

Kebijakan Pengembangan Pariwisata Sungai Musi di Pasar 16 Ilir Kota Palembang

Galuh Efnol Adzan¹, Novitry Pratiwi², Zetia Wijayanti³.

^{1,2,3} Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya.

E-mail: gunawan_andrie@ymail.com (CA)

Abstrak: Sungai Musi merupakan aset pariwisata strategis Kota Palembang yang menghadapi tantangan kompleks dalam pengelolaan kawasan tepian sungai, khususnya di Pasar 16 Ilir sebagai destinasi wisata kuliner dan budaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan literatur untuk menganalisis tiga masalah krusial: pengelolaan sampah yang tidak optimal, proliferasi bangunan semi permanen di atas permukaan sungai, dan buruknya sanitasi yang berdampak pada kontaminasi air. Penelitian ini mengintegrasikan kerangka teoritis infrastruktur hijau, pariwisata berbasis masyarakat, dan model pariwisata 4A (*Attraction, Accessibility, Amenities, Ancillary*) dengan konteks kearifan lokal Palembang. Temuan menunjukkan bahwa solusi berbasis alam (*nature-based solutions*) yang dikombinasikan dengan tata kelola partisipatif dan peningkatan komponen 4A telah berhasil diterapkan di koridor sungai Jakarta, Kuala Lumpur, dan kota-kota lain di Asia Tenggara. Penelitian ini merekomendasikan paket kebijakan terintegrasi untuk Pemerintah Kota Palembang yang mencakup regulasi zona penyangga riparian, investasi infrastruktur terminal dan sanitasi, pembentukan koperasi pedagang, serta pilot program pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular.

Kata Kunci: Pariwisata Sungai, Infrastruktur Hijau, Pariwisata Berbasis Masyarakat.

Sitasi: Adzan, G. E., Pratiwi, N., & Wijayanti, Z. (2026). Kebijakan Pengembangan Pariwisata Sungai Musi di Pasar 16 Ilir Kota Palembang. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 5(1), 22–36. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v5i1.795>

1. Pendahuluan

Sungai Musi merupakan arteri kehidupan dan identitas budaya Kota Palembang yang telah memainkan peran sentral dalam sejarah maritim dan perdagangan Nusantara sejak era Kerajaan Sriwijaya. Sebagai koridor sungai perkotaan yang menghubungkan fungsi transportasi, ekonomi, dan budaya, Sungai Musi memiliki potensi strategis sebagai aset pariwisata yang dapat mengintegrasikan dimensi ekologi, rekreasi, dan ekonomi lokal. Pasar 16 Ilir, sebagai salah satu destinasi wisata kuliner dan budaya yang terletak di tepian Sungai Musi berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kota Palembang tahun 2025 yang menjadi representasi kompleksitas pengelolaan pariwisata sungai perkotaan di Indonesia. Kawasan ini menawarkan pengalaman autentik kuliner tradisional Palembang, aktivitas perdagangan, dan interaksi sosial-

budaya yang khas, namun menghadapi tantangan serius dalam aspek pengelolaan lingkungan dan tata ruang yang mengancam keberlanjutan fungsi pariwisatanya.

Koridor sungai perkotaan di Asia Tenggara, termasuk Sungai Musi, menghadapi tiga masalah krusial yang saling terkait dan menghambat pengembangan pariwisata berkelanjutan. Pengelolaan bangunan di tepi Sungai Musi di Kota Palembang diatur dalam Peraturan Walikota (Perwali) Kota Palembang Nomor 55 Tahun 2014 tentang Ketentuan Penataan Bangunan di Tepi Sungai. Pertama, pengelolaan sampah yang tidak optimal di kawasan tepian sungai telah menjadi isu kronis yang menurunkan kualitas estetika dan kesehatan lingkungan. Studi komparatif di kawasan pasar sungai Asia Tenggara menunjukkan bahwa polusi sungai perkotaan bersumber terutama dari limbah padat dan cair domestik serta efluen komersial skala kecil yang tidak terkelola dengan baik (Khrisrachmansyah et al., 2020; Mohd Yusman et al., 2023). Pola pembuangan sampah yang tidak terkontrol dari aktivitas pasar dan permukiman tepian sungai mengakibatkan akumulasi limbah organik dan anorganik yang mencemari badan air dan mengganggu fungsi ekologis sungai. Kedua, proliferasi bangunan semi permanen di atas permukaan sungai telah mengganggu estetika lanskap sungai, mengurangi navigabilitas, dan memfragmentasi konektivitas koridor sungai (Khrisrachmansyah et al., 2020; Lin et al., 2016). Struktur informal ini umumnya dibangun oleh pedagang dan penduduk lokal untuk keperluan perdagangan dan hunian, menciptakan kompleksitas sosial-ekonomi dalam upaya penataan kawasan. Ketiga, buruknya sanitasi di kawasan pasar tepian sungai berdampak langsung pada kontaminasi air sungai melalui pembuangan limbah domestik yang tidak diolah, menciptakan risiko kesehatan masyarakat dan menurunkan daya tarik wisata (Mohd Yusman et al., 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk mensintesis bukti empiris dan kerangka teoritis dari studi kasus komparatif di Asia Tenggara guna merumuskan rekomendasi kebijakan pengembangan pariwisata Sungai Musi yang mengintegrasikan pendekatan infrastruktur hijau, tata kelola partisipatif, dan peningkatan komponen pariwisata secara holistik.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi tinjauan literatur untuk mensintesis bukti empiris dan kerangka teoritis terkait pengembangan pariwisata sungai perkotaan di Asia Tenggara. Metode ini memungkinkan identifikasi pola konvergen, kesenjangan pengetahuan, dan praktik terbaik yang dapat diadaptasi untuk konteks Palembang dengan mempertimbangkan kekhasan sosial-budaya dan ekologis lokal.

Kriteria inklusi dan eksklusi sumber literatur ditetapkan secara ketat untuk memastikan relevansi dan kualitas bukti. Kriteria inklusi meliputi: (1) tahun publikasi 2015–2024 untuk memastikan kekinian bukti empiris dan perkembangan teoritis terbaru, (2) fokus geografis pada studi kasus perkotaan di Indonesia dan Asia Tenggara untuk memastikan kesesuaian konteks ekologis tropis dan sosial-budaya regional, (3) prioritas pada jurnal bereputasi yang terindeks Scopus atau Sinta dengan untuk menjamin verifikasi secara metodologis, (4) transparansi metodologis dengan dokumentasi eksplisit tentang desain penelitian, pengumpulan data, dan analisis, serta (5) relevansi tematik terhadap intervensi *nature-based solutions* (NbS), infrastruktur hijau, atau pariwisata berbasis masyarakat di kawasan permukiman informal atau pasar tepian sungai. Kriteria eksklusi mencakup: (1) studi yang tidak menyediakan data empiris atau *monitoring outcome* yang terdokumentasi, (2) publikasi yang fokus pada konteks geografis di luar Asia Tenggara tanpa relevansi teoritis yang jelas, (3) literatur abu-abu tanpa *peer review* yang tidak dapat diverifikasi kualitas metodologisnya, serta (4) studi yang tidak membahas dimensi sosial-ekonomi atau partisipasi masyarakat dalam intervensi lingkungan.

3. Hasil & Pembahasan

3.1. Analisis Masalah Berbasis Data

Kawasan pasar tepian sungai di Asia Tenggara menghadapi masalah lingkungan yang berulang dan terstruktur, yang menghambat pengembangan pariwisata berkelanjutan. Analisis terhadap pola masalah di kawasan pasar sungai Jakarta, Kuala Lumpur, dan kota-kota lain di Asia Tenggara mengungkapkan tiga dimensi krusial yang relevan untuk konteks Pasar 16 Ilir: pola pembuangan sampah, resistensi pedagang terhadap revitalisasi, dan praktik sanitasi yang buruk.

Pola Pembuangan Sampah di Kawasan Pasar Sungai

Studi komparatif di kawasan pasar sungai Asia Tenggara mengidentifikasi limbah padat dan cair domestik serta efluen komersial skala kecil sebagai sumber utama polusi sungai perkotaan di wilayah tropis (Khri Rachmansyah et al., 2020; Mohd Yusman et al., 2023). Proyek pengelolaan sungai berbasis masyarakat di Jakarta menunjukkan bahwa limbah pedagang yang tidak terkelola dan pembuangan limbah rumah tangga terkonsentrasi di sepanjang bantaran sungai, menciptakan hotspot polusi yang memerlukan intervensi sosial dan teknis secara simultan (Dhia et al., 2024). Pola pembuangan sampah ini tidak hanya mencemari badan air tetapi juga menurunkan nilai estetika lanskap sungai yang merupakan komponen kritis dari daya tarik wisata. Akumulasi sampah organik dari aktivitas pasar kuliner, dikombinasikan dengan limbah plastik dan kemasan, menciptakan beban polutan yang melebihi kapasitas asimilasi alami sungai, terutama pada musim kemarau ketika debit air rendah.

Temuan empiris dari proyek pengelolaan Sungai Ciliwung di Depok menunjukkan bahwa intervensi pengelolaan sampah yang efektif memerlukan kombinasi infrastruktur teknis (tempat sampah terpilah, sistem pengumpulan reguler) dengan program edukasi masyarakat dan insentif ekonomi untuk mendorong partisipasi pedagang (Dhia et al., 2024; Vollmer et al., 2014). Pendekatan ini mengakui bahwa masalah sampah bukan semata-mata isu teknis infrastruktur, tetapi juga terkait dengan perilaku, kapasitas ekonomi, dan sistem tata kelola lokal.

Dalam konteks Pasar 16 Ilir, pola pembuangan sampah yang tidak optimal kemungkinan besar dipengaruhi oleh keterbatasan infrastruktur pengumpulan sampah, ketiadaan sistem pemilahan di sumber, serta keterbatasan kesadaran dan kapasitas ekonomi pedagang untuk mengelola limbah secara bertanggung jawab. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, setidaknya hanya terdapat 1 bak sampah untuk mengakomodasi seluruh kegiatan di Pasar 16 Ilir. Aktivitas di Pasar 16 Ilir tidak hanya perdagangan pasar tradisional, namun ada juga aktivitas *cafe* terapung di tepi Sungai Musi.

Respon Pedagang terhadap Revitalisasi Pasar Sungai

Bukti empiris dari Jakarta mengindikasikan bahwa adanya resistensi pedagang terhadap program revitalisasi sering kali berakar pada ketidakamanan mata pencaharian (*livelihood insecurity*), ketidakjelasan kompensasi relokasi, dan ketidakpercayaan terhadap rencana normalisasi yang bersifat *top-down* (Prasetyanti, 2015). Studi tentang inisiatif *pro-poor tourism* dan *slum tourism* berargumen bahwa ketika intervensi mengabaikan ketergantungan ekonomi lokal, pedagang akan menolak perubahan karena persepsi ancaman terhadap sumber pendapatan mereka (Prasetyanti, 2015). Resistensi ini merupakan respons rasional terhadap ketidakpastian ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh program penataan yang tidak melibatkan pedagang dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.

Penelitian tentang skenario rehabilitasi sungai yang mengintegrasikan pemodelan lanskap dan hidrodinamik melaporkan adanya hubungan antara solusi rekayasa pemerintah dengan prioritas masyarakat terkait akses dan kelangsungan usaha warung (Lin et al., 2016). Ketegangan ini mencerminkan konflik fundamental antara paradigma normalisasi sungai yang menekankan efisiensi hidrolis dan keamanan banjir dengan kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat tepian sungai yang mengandalkan akses langsung ke sungai untuk aktivitas perdagangan dan mata pencaharian.

Dalam konteks Pasar 16 Ilir, respon pedagang terhadap penataan bangunan kemungkinan besar akan muncul jika program revitalisasi tidak menyediakan

mekanisme kompensasi yang adil, alternatif ruang perdagangan yang layak, dan proses konsultasi partisipatif yang inklusif. Hal ini telah terjadi pada saat Pemerintah Kota Palembang melakukan revitalisasi Pasar 16 Ilir mengalami resistensi dari para pedagang terhadap pengelola Pasar 16 Ilir saat ini, yakni PT Bima Citra Realty (BCR). Konflik terkait status kepemilikan ini sudah berlangsung sejak tahun 2023, namun hingga saat ini pemerintah melalui pengelola Pasar 16 Ilir dan pedagang belum menemukan titik temu yang disepakati.

Praktik Sanitasi dan Kontaminasi Limbah

Korpus literatur yang di-*review* mencatat bahwa koneksi sanitasi rumah tangga yang buruk berkontribusi signifikan terhadap polusi sungai di zona tepian sungai perkotaan. Praktik sanitasi yang buruk di kawasan pasar tepian sungai umumnya mencakup pembuangan air limbah domestik langsung ke sungai tanpa pengolahan, penggunaan toilet yang tidak memadai atau tidak tersambung ke sistem septik yang layak, serta kontaminasi silang antara aktivitas perdagangan makanan dengan sumber air yang tercemar.

Dampak kesehatan masyarakat dari kontaminasi sanitasi mencakup peningkatan risiko penyakit *waterborne* seperti diare, kolera, dan hepatitis A, yang dapat mempengaruhi tidak hanya pedagang dan penduduk lokal tetapi juga wisatawan yang mengonsumsi makanan atau berinteraksi dengan lingkungan pasar. Studi di Kuala Lumpur menekankan perlunya program pengelolaan limbah yang terintegrasi dengan intervensi desain (bentuk sungai dan bangunan, penutupan hijau) untuk meningkatkan kualitas lanskap sungai bagi penggunaan publik (Mohd Yusman et al., 2023). Dalam konteks Pasar 16 Ilir, tidak adanya data resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata Kota Palembang terkait kontaminasi sanitasi yang terukur merupakan hambatan serius untuk merancang intervensi kesehatan masyarakat yang efektif dan berbasis bukti.

Dampak Struktur Informal terhadap Estetika dan Fungsi Sungai

Struktur informal dan semi permanen di tepian sungai mengurangi kemampuan navigasi, memfragmentasi konektivitas koridor sungai, dan menurunkan amenitas visual, sehingga memperumit rehabilitasi berbasis lanskap dan desain pengalaman pengunjung (Khrisrachmansyah et al., 2020; Lin et al., 2016). Bangunan-bangunan ini, yang sering kali dibangun secara bertahap tanpa izin formal, menciptakan lanskap yang tidak teratur dan mengganggu kontinuitas visual koridor sungai yang merupakan elemen penting dari pengalaman wisata. Selain itu, struktur informal dapat menghambat aliran air, meningkatkan risiko banjir lokal, dan menciptakan zona stagnasi yang memperburuk akumulasi sampah dan pertumbuhan vektor penyakit.

Dari perspektif pariwisata, proliferasi bangunan semi permanen menurunkan daya tarik estetika kawasan dan menciptakan persepsi negatif tentang kebersihan dan keamanan lingkungan. Namun, dari perspektif pedagang, struktur-struktur ini merupakan aset ekonomi yang vital dan representasi dari investasi modal dan tenaga kerja yang telah mereka lakukan selama bertahun-tahun. Sintesis bukti empiris menunjukkan bahwa literatur konvergen pada diagnosis sosio-ekologis campuran: polusi terutama berasal dari sumber domestik dan pasar lokal; ketergantungan pedagang pada perdagangan tepian sungai menciptakan hambatan sosial untuk relokasi; dan tanpa monitoring yang ditargetkan, perencanaan kekurangan baseline kualitas air tingkat pasar untuk merancang intervensi yang melindungi kesehatan (Dhia et al., 2024; Mohd Yusman et al., 2023; Wolff et al., 2023).

3.2. Kerangka Teoritis Infrastruktur Hijau

Infrastruktur hijau dan kerangka berbasis alam (*nature-based solutions*, NbS) diterapkan pada koridor sungai untuk memulihkan fungsi ekologis, mengelola limpasan air hujan, dan menciptakan ruang publik multifungsi yang mengintegrasikan layanan ekosistem, mitigasi banjir, dan amenitas masyarakat sebagai nilai inti untuk revitalisasi (Wolff et al., 2023). Pendekatan infrastruktur hijau merepresentasikan pergeseran paradigma dari rekayasa sungai konvensional yang menekankan normalisasi kanal tunggal-fungsi menuju desain koridor sungai yang multifungsi, ekologis, dan sosial.

Fondasi Teoritis dan Framing Nature-Based Solutions

Review NbS memposisikan intervensi yang mengombinasikan restorasi ekologis dengan manfaat sosial, termasuk layanan ekosistem, mitigasi banjir, dan amenitas masyarakat sebagai prinsip inti untuk intervensi tepian sungai, dengan argumen bahwa multifungsionalitas merupakan prinsip desain sentral (Wolff et al., 2023). Kerangka NbS mengakui bahwa koridor sungai perkotaan harus melayani *multiple objectives* secara simultan: fungsi hidrolis untuk drainase dan pengendalian banjir, fungsi ekologis untuk habitat dan kualitas air, fungsi sosial untuk rekreasi dan interaksi masyarakat, serta fungsi ekonomi untuk pariwisata dan mata pencaharian lokal. Logika *water sensitive urban design* (WSUD) dan infrastruktur hijau memposisikan koridor sebagai sistem terintegrasi untuk pengolahan *stormwater* (limpasan air hujan), habitat, dan rekreasi, bukan sekadar kanal rekayasa dengan fungsi tunggal (Cook et al., 2019; Przeźrzelka et al., 2024).

Pendekatan WSUD menekankan pentingnya mengelola air hujan di sumbernya melalui infiltrasi, filtrasi, dan evapotranspirasi menggunakan elemen vegetasi dan tanah, sehingga mengurangi beban polutan yang masuk ke badan air dan meningkatkan resiliensi terhadap perubahan iklim. Dalam konteks koridor sungai perkotaan tropis

seperti Sungai Musi, prinsip-prinsip WSUD dapat diadaptasi untuk mengelola limpasan dari kawasan pasar dan permukiman tepian sungai melalui biofilter, *rain gardens* (penampungan air hujan), dan zona penyangga riparian yang berfungsi sebagai filter alami untuk polutan sebelum mencapai sungai utama.

Aplikasi Infrastruktur Hijau di Koridor Sungai Asia Tenggara

Skenario rehabilitasi Sungai Ciliwung Jakarta mendemonstrasikan integrasi restorasi lanskap dengan pemodelan hidrodinamik untuk menciptakan koridor hijau riparian dan mengurangi pendekatan normalisasi yang hanya berbasis rekayasa (Lin et al., 2016). Studi ini menunjukkan bahwa skenario yang mengintegrasikan elemen infrastruktur hijau seperti riparian *buffer zones*, *wetlands* buatan, dan vegetasi tepian sungai dapat mencapai *multiple benefits*: pengurangan kecepatan aliran untuk mitigasi banjir, peningkatan kualitas air melalui filtrasi biologis, penciptaan habitat untuk biodiversitas perkotaan, serta peningkatan nilai estetika dan rekreasi untuk masyarakat. Panduan Kuala Lumpur mengombinasikan intervensi desain (bentuk sungai dan bangunan, penutupan hijau) dengan program pengelolaan limbah untuk meningkatkan kualitas lanskap sungai bagi penggunaan publik (Mohd Yusman et al., 2023).

Studi kasus Jakarta dan Kuala Lumpur menunjukkan jalur perencanaan yang positif, dan proyek ekowisata Indonesia menyoroti sinergi antara partisipasi masyarakat dengan perencanaan hijau (Dhia et al., 2024; Gozzoli et al., 2022; Setyawati & Nugraha, 2023). Namun, bukti komparatif untuk Bangkok, Delta Mekong, Singapura, dan Malaysia yang lebih luas tidak tersedia dalam dataset yang disediakan; oleh karena itu, perbandingan kasus multi-kota yang detail merupakan bukti yang tidak memadai dalam korpus literatur ini. Keterbatasan ini mengindikasikan perlunya penelitian komparatif yang lebih sistematis untuk mengidentifikasi faktor kontekstual yang mempengaruhi keberhasilan implementasi infrastruktur hijau di berbagai *layout* perkotaan Asia Tenggara.

Regulasi Tata Ruang Berbasis Infrastruktur Hijau

Regulasi tata ruang yang efektif harus menetapkan zona penyangga riparian yang jelas dengan lebar minimum yang didasarkan pada karakteristik ekologis dan hidrolis sungai, melarang pembangunan permanen dalam zona penyangga, dan menyediakan insentif untuk restorasi vegetasi riparian oleh pemilik lahan atau pedagang. Dalam konteks Pasar 16 Ilir, regulasi tata ruang berbasis infrastruktur hijau harus mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan ekologis sungai dengan kebutuhan ekonomi pedagang. Pendekatan yang sensitif terhadap kepemilikan lahan (dalam hal ini HGU bangunan di Pasar 16 Ilir) dapat mencakup formalisasi zona perdagangan yang diizinkan dengan standar desain yang jelas, penyediaan struktur pasar yang dirancang secara profesional dengan integrasi elemen hijau, serta

mekanisme kompensasi atau relokasi yang adil untuk pedagang yang terdampak oleh penataan zona penyangga.

Integrasi dengan Pengelolaan Permukiman Informal

Proyek *NbS* yang secara eksplisit dirancang untuk permukiman informal mendemonstrasikan kebutuhan untuk menggabungkan tindakan ekologis dengan opsi mata pencaharian yang sensitif terhadap keamanan kepemilikan lahan, perlindungan mata pencaharian, dan tata kelola partisipatif (Wolff et al., 2023). Proyek-proyek yang berhasil umumnya melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan awal, menyediakan pelatihan dan kapasitas untuk pemeliharaan infrastruktur hijau, serta menciptakan mekanisme *benefit-sharing* yang memastikan bahwa masyarakat lokal mendapatkan manfaat langsung dari peningkatan kualitas lingkungan.

Dalam konteks Pasar 16 Iilir, integrasi infrastruktur hijau dengan pengelolaan permukiman informal memerlukan pendekatan yang holistik dan partisipatif. Ini dapat mencakup *pilot projects* untuk kawasan riparian yang dikelola oleh pedagang, pembangunan penampungan sampah skala kecil untuk mendukung pengolahan limbah pasar, serta program insentif untuk pedagang yang mengadopsi praktik pengelolaan sampah dan sanitasi yang lebih baik. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kualitas lingkungan tetapi juga membangun kapasitas lokal dan rasa kepemilikan dari masyarakat yang penting untuk keberlanjutan jangka panjang.

3.3. Model Pariwisata Berbasis Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam model kebijakan *bottom-up* dan tata kelola partisipatif merupakan strategi berulang dalam studi pariwisata sungai Indonesia, hal ini sebagai bukti untuk mendukung perlindungan mata pencaharian, dan integrasi kearifan lokal sebagai faktor keberhasilan kritis (Abus et al., 2022; Setyawati & Nugraha, 2023). Model pariwisata berbasis masyarakat (*community-based tourism*, CBT) merepresentasikan paradigma alternatif terhadap pengembangan pariwisata konvensional yang sering kali didominasi oleh investor eksternal dan mengabaikan kepentingan masyarakat lokal (Azwar et al., 2023; Tran et al., 2024).

Kerangka Teoritis dan Tata Kelola Partisipatif

Kerangka CBT menekankan bahwa masyarakat lokal harus memiliki kontrol yang signifikan terhadap pengembangan dan pengelolaan pariwisata, termasuk dalam pengambilan keputusan tentang jenis aktivitas wisata, skala pengembangan, distribusi manfaat ekonomi, dan perlindungan nilai-nilai budaya dan lingkungan. Tata kelola partisipatif dalam konteks pariwisata sungai memerlukan pembentukan struktur

organisasi lokal yang representatif, mekanisme pengambilan keputusan yang inklusif, serta sistem monitoring dan evaluasi yang melibatkan masyarakat.

Studi tentang CBT di Thailand dan Laos menunjukkan bahwa keberhasilan model ini bergantung pada beberapa faktor kunci: legitimasi dan kekuatan pemangku kebijakan tingkat lokal, dukungan pemerintah dan NGO dalam peningkatan kapasitas, akses ke pasar dan jaringan promosi, serta kemampuan untuk menyeimbangkan tujuan ekonomi dengan konservasi lingkungan dan budaya (Chaichawwong & Madhyamapurush, 2016; Sripun et al., 2017). Dalam konteks Pasar 16 Ilir, penerapan model CBT memerlukan identifikasi dan penguatan *stakeholder* lokal yang dapat memainkan peran *leadership*, termasuk asosiasi pedagang, tokoh masyarakat, dan kelompok pemuda yang memiliki visi untuk pengembangan pariwisata berkelanjutan.

Strategi Mengatasi Respon Pedagang

Studi kasus merekomendasikan konsultasi inklusif, relokasi bertahap dengan kompensasi atau ruang perdagangan alternatif, dan desain partisipatif tata letak pasar untuk mengurangi resistensi; aktivitas pilot yang dipimpin masyarakat (edukasi, penanaman pohon, pengumpulan sampah) membangun kepercayaan dan mendemonstrasikan manfaat nyata (Abus et al., 2022; Dhia et al., 2024). Strategi ini mengakui bahwa resistensi pedagang bukan semata-mata irasional atau obstructif, tetapi merupakan respons terhadap ketidakpastian dan ancaman terhadap mata pencaharian yang perlu dikelola melalui komunikasi yang transparan, proses yang adil, dan demonstrasi manfaat konkret.

Pendekatan bertahap yang dimulai dengan *pilot projects* skala kecil memungkinkan pedagang untuk melihat dan merasakan manfaat dari intervensi sebelum komitmen skala penuh. Misalnya, pilot program pengelolaan sampah yang melibatkan sekelompok pedagang sukarela dapat mendemonstrasikan bahwa lingkungan yang lebih bersih meningkatkan kenyamanan pelanggan dan potensial meningkatkan penjualan. Keberhasilan pilot ini kemudian dapat digunakan untuk memotivasi pedagang lain untuk berpartisipasi. Desain partisipatif tata letak pasar yang melibatkan pedagang dalam proses perencanaan memastikan bahwa solusi yang dihasilkan mempertimbangkan kebutuhan operasional mereka dan meningkatkan *sense of ownership* terhadap hasil akhir.

Faktor Keberhasilan Pariwisata Sungai Berbasis Masyarakat di Indonesia

Kepemimpinan lokal, mekanisme pembagian manfaat yang jelas, peningkatan kapasitas untuk pedagang kecil, dan penyelarasan penawaran pariwisata dengan mata pencaharian yang ada secara berulang dikutip sebagai pengembangan pariwisata sungai yang berkelanjutan (Dhia et al., 2024; Setyawati & Nugraha, 2023).

Kepemimpinan lokal yang efektif oleh Walikota Palembang dapat menyediakan visi, koordinasi, dan representasi kepentingan masyarakat dalam negosiasi dengan pemerintah dan sektor swasta. Mekanisme pembagian manfaat yang transparan dan adil memastikan bahwa keuntungan ekonomi dari pariwisata didistribusikan secara merata dan tidak hanya dinikmati oleh segelintir elite lokal.

Peningkatan kapasitas untuk pedagang kecil mencakup pelatihan dalam *hospitality*, *hygiene* dan *food safety*, manajemen keuangan sederhana, serta keterampilan komunikasi dengan wisatawan. Penyelarasan penawaran pariwisata dengan mata pencaharian yang ada memastikan bahwa pengembangan pariwisata tidak menggantikan tetapi memperkuat aktivitas ekonomi tradisional. Dalam pengembangan kawasan Pasar 16 Ilir, ini berarti mengembangkan produk wisata kuliner yang menonjolkan makanan tradisional Palembang, wisata budaya yang menginterpretasikan sejarah dan tradisi pasar sungai.

Integrasi Kearifan Lokal dalam Pengembangan Pariwisata

Studi menekankan pelestarian dan interpretasi kearifan lokal dan ritual dalam desain lanskap sungai dan pengalaman pengunjung, menggunakan narasi budaya untuk meningkatkan daya tarik pariwisata (Setyawati & Nugraha, 2023). Kearifan lokal Palembang terkait Sungai Musi mencakup pengetahuan tradisional tentang wisata sejarah, kuliner khas seperti pempek, serta ritual dan festival yang terkait dengan sungai seperti di Pulau Kemaro yang banyak dikunjungi oleh masyarakat Tionghoa saat Hari Raya Imlek. Integrasi kearifan lokal ini tidak hanya memperkaya pengalaman wisatawan tetapi juga memperkuat identitas budaya masyarakat lokal dan menciptakan insentif untuk pelestarian tradisi.

Rekomendasi operasional yang diambil dari kasus-kasus mencakup pembentukan komite manajemen masyarakat, uji coba produk ekowisata skala kecil, menghubungkan aktivitas pengelolaan sampah dengan pendapatan (misalnya, koperasi daur ulang), dan mendokumentasikan pengetahuan tradisional sebagai bagian dari program interpretasi (Abus et al., 2022; Dhia et al., 2024). Dalam hal ini dapat mencakup pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang terdiri dari pedagang dan penduduk lokal, pengembangan paket wisata kuliner dan budaya yang dipandu oleh anggota masyarakat, serta program dokumentasi dan interpretasi sejarah tentang perdagangan di Sungai Musi di Kota Palembang.

3.4. Integrasi Model Pariwisata 4A

Komponen model 4A (*Attraction, Accessibility, Amenities, Ancillary*) memetakan secara langsung investasi pariwisata tepian sungai (Dhia et al., 2024). Model 4A menyediakan kerangka komprehensif untuk menganalisis dan merencanakan sistem pariwisata yang

mengintegrasikan semua elemen penting yang diperlukan untuk pengalaman wisata yang memuaskan.

Aplikasi Model 4A pada Kawasan Tepi Sungai

Studi pariwisata sungai secara empiris menekankan atraksi (kualitas ekologis dan budaya), aksesibilitas (koneksi perahu dan pejalan kaki), dan amenities (sanitasi, tempat duduk, tempat sampah) sebagai prasyarat untuk pariwisata pasar sungai yang viable secara eksplisit mencantumkan "atraksi, aksesibilitas, dan fasilitas" sebagai komponen pariwisata kritis untuk situs sungai (Dhia et al., 2024). Dalam konteks Pasar 16 Ilir, komponen atraksi mencakup kuliner tradisional Palembang (pempek, model, tekwan), aktivitas pasar yang autentik, arsitektur rumah panggung, serta pemandangan Sungai Musi dan Jembatan Ampera. Komponen aksesibilitas mencakup konektivitas transportasi darat (jalan, parkir, angkutan umum) dan transportasi air (dermaga, perahu wisata), serta aksesibilitas fisik untuk berbagai kelompok pengunjung termasuk lansia dan penyandang disabilitas.

Komponen amenities mencakup fasilitas dasar seperti toilet bersih, tempat sampah yang memadai, tempat duduk, *signage* (penanda) dan informasi wisata, serta fasilitas pendukung seperti area parkir, musholla, dan pusat informasi wisata. Komponen layanan tambahan mencakup layanan pendukung seperti pemandu wisata, keamanan, layanan kesehatan darurat, serta layanan komersial seperti *money changer*, ATM, dan toko souvenir. Integrasi keempat komponen ini secara holistik menciptakan sistem pariwisata yang fungsional dan memuaskan bagi wisatawan.

Hubungan Peningkatan Pelabuhan dan Terminal dengan Peningkatan Pariwisata

Peningkatan infrastruktur pelabuhan/terminal yang meningkatkan transportasi sungai yang aman dan andal serta pengalaman untuk mendukung peningkatan aliran wisatawan, sebagaimana disarankan dalam studi desain lanskap sungai Jakarta dan Deli yang mengombinasikan sirkulasi primer dan terminal dengan ruang pengunjung (Abus et al., 2022; Lin et al., 2016). Terminal sungai yang dirancang dengan baik tidak hanya berfungsi sebagai titik embarkasi dan disembarkasi tetapi juga sebagai gateway yang menciptakan first impression positif bagi wisatawan dan sebagai anchor point untuk aktivitas komersial dan rekreasi.

Di kawasan Pasar 16 Ilir, peningkatan dermaga dan terminal sungai dapat mencakup pembangunan struktur dermaga yang aman dan mudah diakses, area tunggu yang nyaman dengan *shelter*, fasilitas pembelian tiket dan informasi, serta integrasi dengan ruang publik yang menarik seperti pasar atau promenade tepian sungai. Investasi dalam transportasi sungai yang aman dan nyaman, seperti perahu wisata ke Pulau Kemaro dengan jadwal reguler dan standar keselamatan yang jelas, dapat

meningkatkan aksesibilitas kawasan dan menciptakan pengalaman wisata yang unik yang membedakan Kota Palembang dari destinasi lain.

Adaptasi Komponen 4A dengan Konteks Budaya Lokal

Praktik budaya lokal dan mata pencaharian pedagang harus tertanam dalam amenitas dan layanan tambahan untuk menghindari perpindahan fungsi tradisional sambil meningkatkan kenyamanan pengunjung (Setyawati & Nugraha, 2023). Adaptasi budaya dari komponen 4A memastikan bahwa pengembangan pariwisata tidak menghasilkan homogenisasi yang dapat menghilangkan autentisitas dan karakter lokal. Dalam konteks Pasar 16 Ilir, ini berarti mempertahankan tata letak pasar yang organik dan dinamis sambil meningkatkan standar kebersihan dan keamanan, menyediakan papan tanda dan interpretasi dalam bahasa lokal dan bahasa asing.

Amenitas seperti toilet dan tempat sampah harus dirancang dengan mempertimbangkan estetika lokal dan terintegrasi secara harmonis dengan lingkungan pasar. Layanan tambahan seperti pemandu wisata harus direkrut dari masyarakat lokal dan dilatih untuk menginterpretasikan tidak hanya fakta historis tetapi juga cerita, tradisi, dan kearifan lokal yang membuat pengalaman wisata lebih bermakna dan *memorable*. Pendekatan ini menciptakan *win-win solution* di mana wisatawan mendapatkan pengalaman autentik dan berkualitas, sementara masyarakat lokal mendapatkan manfaat ekonomi dan penguatan identitas budaya.

4. Penutup

Sintesis bukti empiris dari 30 studi terpilih mengungkapkan bahwa pengembangan pariwisata sungai berkelanjutan di kawasan pasar tepian sungai Asia Tenggara memerlukan pendekatan terintegrasi yang mengombinasikan infrastruktur hijau, tata kelola partisipatif, dan peningkatan komponen pariwisata 4A. Untuk konteks Pasar 16 Ilir Kota Palembang, penelitian ini merekomendasikan paket kebijakan komprehensif yang mencakup empat pilar utama. Pertama, pilar regulasi yang menetapkan zona penyangga riparian dan aturan yang dikaitkan dengan opsi relokasi yang sensitif terhadap kepemilikan lahan dan zona perdagangan yang diformalkan, mengadaptasi praktik perencanaan koridor hijau dan integrasi WSUD dari studi Jakarta dan Kuala Lumpur (Cook et al., 2019; Lin et al., 2016). Kedua, pilar infrastruktur yang menginvestasikan peningkatan pelabuhan/terminal skala kecil, sanitasi publik, dan titik pengumpulan sampah untuk meningkatkan aksesibilitas dan amenitas serta mengurangi polusi (Abus et al., 2022; Dhia et al., 2024). Ketiga, pilar mekanisme masyarakat yang membentuk koperasi pedagang, *pilot project*, dan perjanjian penerapan NbS, menggunakan interpretasi kearifan lokal untuk menambatkan produk pariwisata (Setyawati & Nugraha, 2023; Wolff et al., 2023). Keempat, pilar aksi sampah

sirkular yang menguji coba skema pemilahan sumber dan daur ulang untuk sampah pasar, mencari kemitraan ekonomi sirkular jika memungkinkan.

Roadmap implementasi yang disarankan terdiri dari tiga fase bertahap. Fase 1 mencakup *baseline monitoring* (kualitas air, aliran sampah, mata pencaharian pedagang) dan pemetaan partisipatif untuk mengidentifikasi titik permasalahan dan prioritas intervensi. Fase 2 melibatkan pilot intervensi GI/NbS (penanaman riparian, biofilter buatan) yang berlokasi berdekatan dengan area pasar, dikombinasikan dengan pilot pengelolaan sampah yang dikelola pedagang untuk kebersihan dan dapat dimanfaatkan secara ekonomis. Fase 3 adalah pembuatan kebijakan dengan instrumen legal (peraturan daerah tentang zona penyangga dan standar bangunan pasar) dan peningkatan terminal yang mudah diakses. Bukti dari pilot Jakarta, Kuala Lumpur, dan ekowisata Indonesia mendukung pendekatan bertahap dan partisipatif ini (Abus et al., 2022; Lin et al., 2016; Mohd Yusman et al., 2023).

Implikasi kebijakan spesifik untuk Pemerintah Kota Palembang mencakup: (1) pembentukan petugas gabungan lintas OPD yang melibatkan Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Perdagangan untuk koordinasi implementasi terintegrasi; (2) alokasi anggaran khusus untuk *pilot projects* infrastruktur hijau dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Pasar 16 Ilir; (3) fasilitasi pembentukan dan penguatan Pokdarwis Pasar 16 Ilir dengan program peningkatan kapasitas yang komprehensif; (4) pengembangan peraturan daerah tentang pengelolaan kawasan tepian sungai yang mengintegrasikan prinsip infrastruktur hijau, WSUD, dan CBT; serta (5) kemitraan dengan universitas lokal dan lembaga penelitian untuk baseline monitoring dan evaluasi dampak intervensi.

Kesimpulannya, pengembangan pariwisata Sungai Musi di Pasar 16 Ilir memerlukan transformasi paradigma dari pendekatan normalisasi sungai yang bersifat *top-down* dan berfokus pada pembangunan secara teknis menuju pendekatan holistik yang mengintegrasikan ekologi, ekonomi, dan budaya melalui infrastruktur hijau, tata kelola partisipatif, dan peningkatan sistematis komponen pariwisata 4A. Keberhasilan transformasi ini bergantung pada komitmen politik pemerintah kota, partisipasi aktif masyarakat lokal, investasi infrastruktur yang memadai, serta *monitoring* dan evaluasi yang berkelanjutan.

Referensi

- Abus, A. F., Lubis, T., Saputra, N., & Delima, D. (2022). Ecotourism to improve the quality of Deli riverscape, Medan City, North Sumatra, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1082(1), 012004. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1082/1/012004>
- Azwar, H., Hanafiah, M. H., Abd Ghani, A., Azinuddin, M., & Mior Shariffuddin, N. S.

- (2023). COMMUNITY-BASED TOURISM (CBT) MOVING FORWARD: PENTA HELIX DEVELOPMENT STRATEGY THROUGH COMMUNITY LOCAL WISDOM EMPOWERMENT. *PLANNING MALAYSIA*, 21. <https://doi.org/10.21837/pm.v21i25.1225>
- Chaichawwong, J., & Madhyamapurush, C. (2016). *The Sustainability and Effects of Community Based Tourism: A Comparative Case Study of Thailand and Lao PDR*. www.iafor.org
- Cook, S., van Roon, M., Ehrenfried, L., LaGro, J., & Yu, Q. (2019). WSUD "Best in Class"—Case Studies From Australia, New Zealand, United States, Europe, and Asia. In *Approaches to Water Sensitive Urban Design* (pp. 561–585). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-812843-5.00027-7>
- Dhia, A. N. B., Nugraha, R. N., & Riya, R. (2024). Ciliwung River Resource Management And Ecotourism By The Ciliwung Community In Depok. *West Science Information System and Technology*, 2(01), 128–141. <https://doi.org/10.58812/wsist.v2i01.847>
- Gozzoli, P. C., Rongrat, T., & Gozzoli, R. B. (2022). Design Thinking and Urban Community Development: East Bangkok. *Sustainability*, 14(7), 4117. <https://doi.org/10.3390/su14074117>
- Khrisrachmansyah, R., Nurfatimah, C., Rachma, A., Utami, A. S., & Prihabsari, A. K. (2020). Eco-contagious: bringing urban riverscape into sustainable urban landscape. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 562(1), 012004. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/562/1/012004>
- Lin, E., Shaad, K., & Girot, C. (2016). Developing river rehabilitation scenarios by integrating landscape and hydrodynamic modeling for the Ciliwung River in Jakarta, Indonesia. *Sustainable Cities and Society*, 20, 180–198. <https://doi.org/10.1016/j.scs.2015.09.011>
- Mohd Yusman, M. Q., Shaari, M. F., Samadi, Z., Ali Ariff, A. A., & B Sanchez, R. (2023). Architecture as Urban Catalyst: Infographic Design Guideline on Kuala Lumpur Riverfront Revitalisation. *International Journal of Sustainable Construction Engineering and Technology*, 14(5). <https://doi.org/10.30880/ijscet.2023.14.05.004>
- Prasetyanti, R. (2015). Slum Kampong Tourism "Jakarta Hidden Tour": Designing Eco-Cultural Based Pro-Poor Tourism. *European Journal of Interdisciplinary Studies*, 3(1), 111. <https://doi.org/10.26417/ejis.v3i1.p111-122>
- Przeźralska, K., Wartalska, K., Rosińska, W., Jurasz, J., & Kaźmierczak, B. (2024). Climate Resilient Cities: A Review of Blue-Green Solutions Worldwide. *Water Resources Management*, 38(15), 5885–5910. <https://doi.org/10.1007/s11269-024-03950-5>
- Setyawati, I., & Nugraha, R. N. (2023). Ciliwung Ecoriparian Tourism Destination Concept for Increasing Local Community Income. *West Science Interdisciplinary Studies*, 1(12), 1214–1223. <https://doi.org/10.58812/wsis.v1i12.425>
- Sripun, M., Yongvanit, S., & Pratt, R. (2017). Power, Legitimacy, and Urgency of

- Community-Based Tourism Stakeholders in Northeastern Thailand. *Asian Social Science*, 13(4), 104. <https://doi.org/10.5539/ass.v13n4p104>
- Tran, T. T. S., Németh, N., Sarker, S. I., Zhang, Y., & Nguyen, N. A. (2024). Community-Based Tourism in Southeast Asia. In *Fenntarthatósági átmenet: kihívások és innovatív megoldások : Nemzetközi tudományos konferencia a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából* (pp. 309–327). Soproni Egyetem Kiadó. https://doi.org/10.35511/978-963-334-499-6-Tran-et_al
- Vollmer, D., Prescott, M. F., Padawangi, R., Girot, C., & Grrt-Regamey, A. (2014). Understanding the Social Value of Urban Riparian Corridors: Considerations in Planning for Green Infrastructure Along the Ciliwung River, Jakarta. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2373818>
- Wolff, E., Rauf, H. A., & Hamel, P. (2023). Nature-based solutions in informal settlements: A systematic review of projects in Southeast Asian and Pacific countries. *Environmental Science & Policy*, 145, 275–285. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2023.04.014>
